

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Gotong-royong sangat perlu dalam kehidupan bermasyarakat pada umumnya. Pada dasarnya masyarakat di era lampau menjadikan gotong royong sebagai kebiasaan, akan tetapi pada zaman sekarang kebiasaan seakan memudar. Dengan kata lain, nilai kolaborasi dan kerja sama sudah mulai hilang. Pada hakekatnya, aktivitas kerja sama sudah ada sejak masa nenek moyang. Orang-orang telah bekerja sama atau bergotong-royong untuk tujuan yang menguntungkan semua orang. Tidak seperti sekarang, masyarakat lebih suka hidup sendiri atau mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan bersama atau masyarakat.

Sangat penting untuk menumbuhkan kebiasaan gotong royong di antara masyarakat karena ini akan membantu pembangunan dan menjalin kebersamaan dalam arti pemberdayaan masyarakat. Karena masyarakat dan pemerintah harus bersatu untuk kemajuan. Jika partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan minim, ada banyak konsekuensi negatif yang dapat terjadi. Pertama, sering terjadi tidak cocok antara rencana pembangunan dan kebutuhan yang ada pada publik. Hal ini disebabkan oleh kurangnya masukan langsung dari masyarakat di sekitar kita, yang paling tahu tentang masalah dan kebutuhan orang-orang. Akibatnya, kebijakan atau program pembangunan yang direncanakan tidak mencapai tujuan mereka dan tidak bekerja dengan baik untuk menyelesaikan masalah yang ada. Selain itu, partisipasi yang rendah dapat mengurangi keberlanjutan pembangunan karena masyarakat merasa tidak terlibat atau

bertanggung jawab atas hasil pembangunan. Karena partisipasi masyarakat yang rendah, sulit untuk memastikan bahwa proyek pembangunan dapat bertahan lama. Partisipasi yang rendah dapat menghilangkan legitimasi rencana pembangunan karena keputusan yang dibuat dianggap tidak mewakili kepentingan dan keinginan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan, demonstrasi, atau bahkan penolakan proyek pembangunan yang sedang dilaksanakan¹. Oleh karena itu, program ini (BBGRM), difungsikan untuk diterapkan di seluruh Indonesia.

Di Indonesia, proses pembangunan menuntut keterlibatan aktif dari seluruh elemen, termasuk masyarakat setempat. Program tahunan BBGRM diinisiasi sebagai upaya untuk menumbuhkan rasa kepedulian serta meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan melalui nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan². Penyelenggaraan program BBGRM ini dilandaskan pada PERMENDAGRI No. 42 Tahun 2005 yang mana pada pasal 2 ayat 1 dijelaskan bahwa Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat diselenggarakan di setiap Desa dan Kelurahan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 pasal 17 ayat 1 dijelaskan juga bahwa program ini mulai berlaku pada saat peraturan ini ditetapkan yaitu pada tanggal 5 Desember tahun 2005.³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 dibawah oleh Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor. 3 Tahun 2004

¹ Suseno, A. (2023). *Analisis Minimnya Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara* (Doctoral dissertation, Universitas Terbuka).

² <https://dinpmd.bojonegorokab.go.id/berita/baca/100>

³ Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 42 Tahu 2005 Tentang BBGRM

tentang Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat yang kemudian disusul oleh Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor. 55 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong, lalu untuk segi pendanaan dimuat dalam Peraturan Daerah Kota Padang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. BBGRM merupakan inisiatif yang bertujuan untuk menghidupkan kembali semangat gotong royong, di mana masyarakat diarahkan untuk bisa ikut serta terlibat secara aktif dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berlandaskan pada prinsip kemandirian dan nilai-nilai sosial budaya. Berbagai program telah dirancang oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat, khususnya dalam pembangunan wilayah pedesaan, menjadi faktor kunci yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program-program tersebut⁴.

Tujuan pelaksanaan manunggal BBGRM ini berdasarkan pada yang tertera pada Petunjuk Teknis Manunggal Bulan Bhakti Gotong Royong Kota Padang diantaranya ialah agar dapat menaikkan kepedulian serta menggali potensi dan partisipasi masyarakat berdasarkan azas kebersamaan, gotong royong dan kerjasama menuju penguatan integritas sosial, meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan dana, sumber daya alam dan tenaga supaya lebih berdaya guna dan berhasil guna, menumbuhkan rasa memiliki oleh masyarakat terhadap hasil pembangunan. Tujuan ini bisa tercapai melalui media gotong royong

⁴ Kireina, S. (2024). *Pemberdayaan Masyarakat untuk Meningkatkan Integrasi Sosial (Studi Kasus Program Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Desa Pusakasari Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis)* (Doctoral dissertation, Universitas Siliwangi).

pada pelaksanaan program pembangunan serta pemeliharaan terhadap hasil dari pembangunan, sembari memperkuat budaya gotong royong sebagai bagian dari budaya leluhur kita dahulu. Program ini dijalankan untuk mempertahankan serta melestarikan budaya gotong royong, meningkatkan peran masyarakat dalam menjalankan proses pembangunan, meningkatkan kemitraan yang ada pada masyarakat dan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan, serta juga nantinya akan dapat meningkatkan rasa saling memiliki serta juga akan meningkatkan rasa tanggung jawab dari pada masyarakat terhadap hasil dari pembangunan yang telah dilaksanakan⁵.

Dengan diterbitkannya PERMENDAGRI Nomor 42 Tahun 2005, diharapkan semangat dan nilai-nilai persatuan dalam bergotong royong yang melekat pada masyarakat dapat dihidupkan kembali, tidak hanya terbatas pada momen-momen tertentu saja. Peraturan ini menjelaskan bahwa pelaksanaan BBGRM akan berlangsung selama satu bulan penuh sebagai bentuk akumulasi kegiatan gotong royong yang dilakukan sepanjang sebelas bulan sebelumnya, berdasarkan prinsip “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.” Tujuan utama dari program ini adalah untuk memperkuat kerja sama antaranggota masyarakat guna menumbuhkan kembali nilai-nilai gotong royong yang telah menjadi budaya luhur para leluhur. Selain itu, program ini juga berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, yang mengarah pada tercapainya pemerataan pembangunan di seluruh

⁵ Frinaldi, A., & Asnil, A. (2023). *Implementasi Penggunaan Dana Stimulan terhadap Partisipasi Masyarakat pada Program BBGRM di*. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(23), 219-227.

wilayah. Pemerintah di tingkat pusat akan melakukan pengarahan kepada pemerintah provinsi dalam perencanaan, pengimplementasian, serta pengendalian BBGRM, kemudian hal yang serupa juga akan dijalankan oleh pemerintahan yang ada di tingkat provinsi untuk mengarahkan kepada pemerintah kabupaten dan kota, lalu hal senada juga akan dilakukan seterusnya hingga ke tingkat kecamatan, kelurahan maupun desa⁶.

Nilai-nilai budaya gotong royong telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia sejak lama. Nilai-nilai tersebut berperan penting dalam memperkuat integrasi sosial dan mendukung pelaksanaan berbagai proyek pembangunan di tingkat desa maupun kelurahan. Melalui pelaksanaan program BBGRM, masyarakat diharapkan mampu menjalin kerja sama dalam berbagai kegiatan, baik di bidang sosial, ekonomi, maupun lingkungan, guna menciptakan kondisi yang kondusif bagi keberlangsungan pembangunan di wilayah mereka⁷.

Tabel 1. 1 Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat Tahun 2024

| NO | Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk |
|----|----------------------|-----------------|
| 1 | Kab. Agam | 530.123 |
| 2 | Kab. Dharmasraya | 237.724 |
| 3 | Kab. Lima Puluh Kota | 397.683 |
| 4 | Kab. Mentawai | 95.068 |
| 5 | Kab. Padang Pariaman | 455.218 |

6 Novita, E. (2017). *Analisis Pelaksanaan Program Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) di Kabupaten Kampar* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

7 jatengprov.go.id, *Pembukaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Ke-15, 2022*, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/pembukaan-bulan-bhakti-gotong-royong-masyarakat-bbgrm-ke-15/>

| | | |
|----|----------------------|----------------|
| 6 | Kab. Pasaman | 309.202 |
| 7 | Kab. Pasaman Barat | 445.439 |
| 8 | Kab. Pesisir Selatan | 528.381 |
| 9 | Kab. Sijunjung | 244.342 |
| 10 | Kab. Solok | 408.424 |
| 11 | Kab. Solok Selatan | 182.573 |
| 12 | Kab. Tanah Datar | 380.727 |
| 13 | Kota Bukittinggi | 138.534 |
| 14 | Kota Padang | 934.847 |
| 15 | Kota Padang Panjang | 62.731 |
| 16 | Kota Pariaman | 101.680 |
| 17 | Kota Payakumbuh | 146.772 |
| 18 | Kota Sawahlunto | 68.380 |
| 19 | Kota Solok | 82.478 |

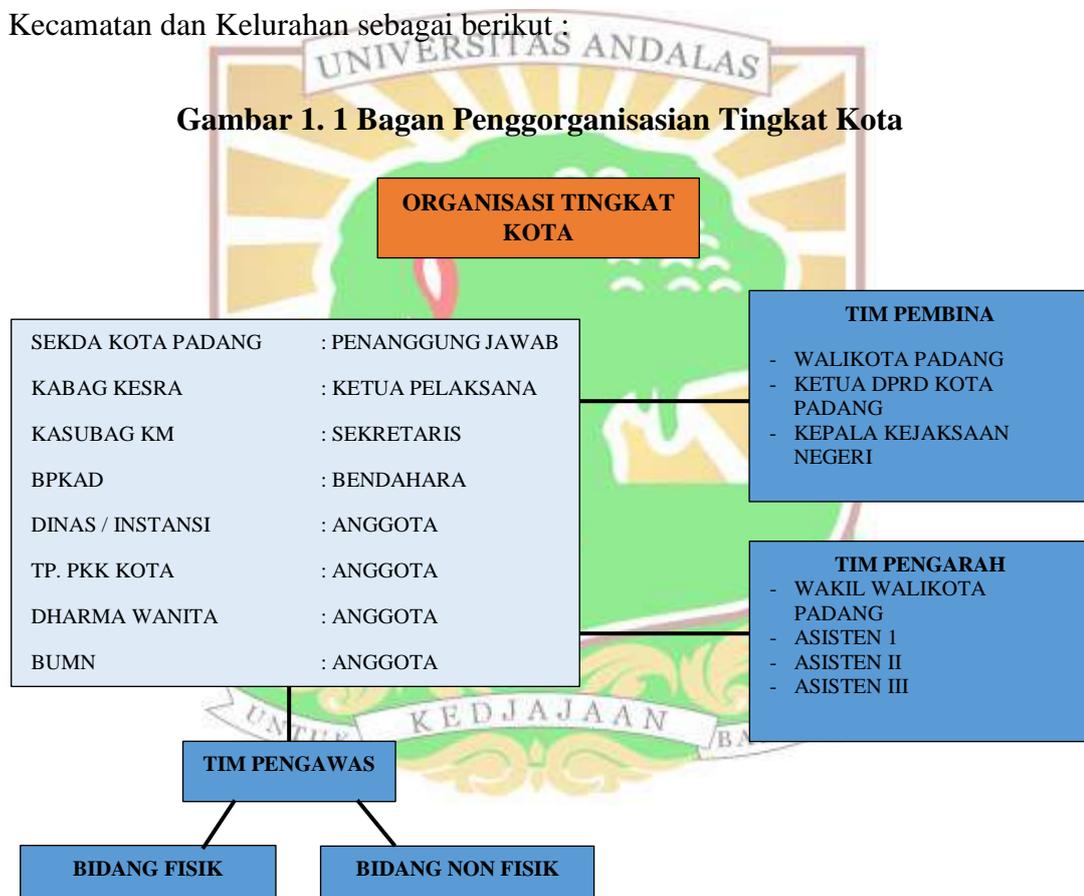
Sumber : data kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil)

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa Kota Padang memiliki jumlah penduduk yang jauh lebih besar dibandingkan kabupaten atau kota lain di Sumatera Barat, yaitu sebanyak 934.847 jiwa. Tingginya jumlah penduduk ini tentu memberikan dampak langsung terhadap proses implementasi program BBGRM di tengah masyarakat, karena semakin besar jumlah penduduk, semakin kompleks pula tantangan dalam mengkoordinasikan partisipasi dan keterlibatan aktif warga dalam pelaksanaan program tersebut. Selain itu kondisi masyarakat Kota Padang yang cenderung lebih mengarah ke Heterogen dengan latar belakang yang berbeda-beda juga menjadi tantangan dalam pelaksanaan program ini dikarenakan masyarakatnya

yang cenderung lebih individualis, sehingga menyebabkan minimnya tingkat partisipasi dalam kegiatan ini. Beberapa penjelasan diatas menjadi alasan peneliti untuk mengambil lokasi penelitian di Kota Padang.

Untuk memperlancar koordinasi dalam pelaksanaan BBGRM perlu dibentuk wadah organisasi dengan melibatkan seluruh unsur/ komponen Pemerintah dan Masyarakat. Pengorganisasi Kegiatan Manunggal Tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan sebagai berikut :

Gambar 1. 1 Bagan Pengorganisasian Tingkat Kota



Sumber : Juknis BBGRM Kota Padang

Gambar 1. 2 Bagan Pengorganisasian Tingkat Kecamatan



Sumber : Juknis BBGRM Kota Padang

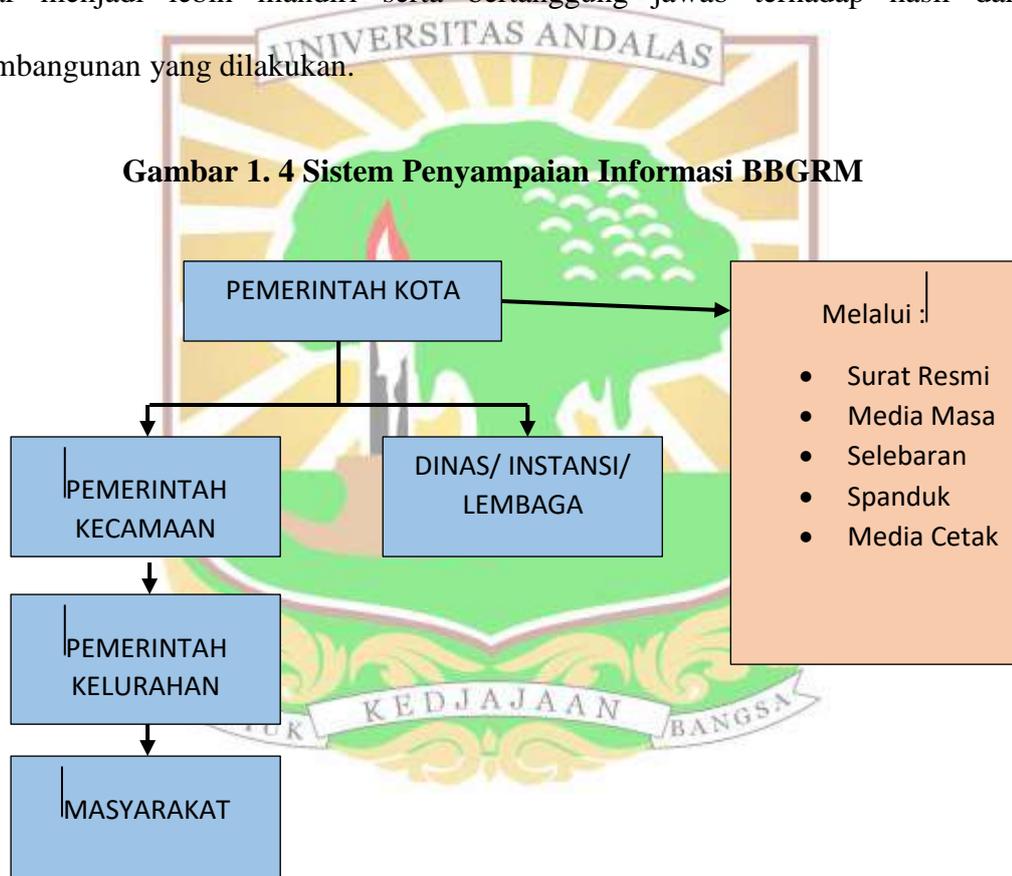
Gambar 1. 3 Bagan Pengorganisasian Tingkat Kelurahan



Sumber Juknis BBGRM Kota Padang

Pada Gambar diatas dapat dilihat bahwa kegiatan ini akan melibatkan seluruh stakeholders, mulai dari lembaga pemerintahan tingkat Kota, Kecamatan hingga Kelurahan, dan juga termasuk lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti LPM, LKK, Karang Taruna, PKK, RT/RW, aparat keamanan hingga masyarakat umum. Dengan menggunakan prinsip "dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat", BBGRM bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat agar menjadi lebih mandiri serta bertanggung jawab terhadap hasil dari pembangunan yang dilakukan.

Gambar 1. 4 Sistem Penyampaian Informasi BBGRM



Sumber : JUKNIS BBGRM Kota Padang

Pelaksanaan BBGRM di Kota Padang dilaksanakan di 11 Kecamatan se-Kota Padang, dengan mengerahkan setiap unsur masyarakat dan menggerakkan semangat gotong royong di setiap lokasi kegiatan yang. Pada gambar 1.4 dapat

dilihat bahwa penyampaian informasi pelaksanaan Manunggal BBGRM dilakukan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Padang kepada masyarakat mulai dari Tingkat Kota, Dinas Instansi, Kecamatan dan Kelurahan serta penyampaian informasi melalui himbauan, media masa, surat resmi, RRI Regional Kota Padang, maupun TV Padang.

Segala bentuk sumber dari pendanaan yang berkaitan dengan langkah persiapan untuk pelaksanaan kegiatan BBGRM di Kota Padang bersumber pada:

1. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Padang pada DPA Kecamatan se - Kota Padang.
2. Swadaya masyarakat meliputi, tenaga, tanah, bahan material, tanaman dan konsumsi.
3. Sumber-sumber lain yang sifatnya tidak mengikat dari BUMN, BUMD, swasta dan dari perorangan.

Dana yang dianggarkan untuk mendukung kegiatan Manunggal Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat berjumlah Rp. 35.000.000 untuk masing-masing kelurahan yang mana dana ini bersumber pada DPA Kecamatan. Pencairan dana fisik dan non fisik dilaksanakan oleh Camat selaku SKPD Kecamatan sesuai dengan aturan yang berlaku. Bagian Pertanggung Jawaban Keuangan dibuat oleh Lurah bersama Panitia Manunggal.⁸

⁸ Juknis BBGRM Kota Padang

Tabel 1. 2 Pelaksanaan BBGRM di Seluruh Kecamatan Kota Padang

| NO | Kecamatan | Jumlah Kelurahan | Fokus Kegiatan |
|----|-------------------------------|------------------|---|
| 1 | Kecamatan Bungus Teluk Kabung | 6 | Pembersihan dan perawatan fasilitas umum |
| 2 | Kecamatan Lubuk Kilangan | 7 | Perbaikan dan perawatan saluran irigasi |
| 3 | Kecamatan Lubuk Begalung | 15 | Pembersihan dan perawatan fasilitas umum |
| 4 | Kecamatan Padang Selatan | 12 | Pembukaan dan pengecoran jalan baru |
| 5 | Kecamatan Padang Timur | 10 | Betonisasi jalan, perbaikan DAM aliran air, renovasi saluran drainase, perbaikan riol |
| 6 | Kecamatan Padang Barat | 10 | Pergerjaan saluran drainase tertutup |
| 7 | Kecamatan Padang Utara | 7 | Pembukaan dan pembangunan |

| NO | Kecamatan | Jumlah Kelurahan | Fokus Kegiatan |
|----|-----------------------|------------------|--|
| | | | jalan penghubung |
| 8 | Kecamatan Nanggalo | 6 | Pembersihan dan perbaikan fasilitas umum |
| 9 | Kecamatan Kuranji | 9 | Pembukaan dan pengecoran jalan baru |
| 10 | Kecamatan Pauh | 9 | Pembukaan dan pengecoran jalan baru |
| 11 | Kecamatan Koto Tengah | 14 | Pembukaan dan pengecoran jalan baru |

Sumber : Data BBGRM Kesra Kota Padang

Pada table 1.3 dapat dilihat bahwa pelaksanaan BBGRM di sebelas Kecamatan yang ada di Kota Padang memiliki jenis pembangunan yang bervariasi, mulai dari betonisasi jalan, perbaikan DAM aliran air, renovasi saluran drainase, hingga perbaikan riol. Ini mengartikan bahwa pembangunan melalui BBGRM mempunyai arti dan peran yang strategis dalam fokusnya menjalankan Pembangunan Nasional, kelurahan merupakan landasan dari kekuatan ekonomi, sosial budaya, politik dan keamanan, dan merupakan titik utama serta ujung tombak dari penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan baik yang ada pada tingkat daerah maupun nasional.

Gambar 1. 5 Dokumentasi BBGRM Kota Padang

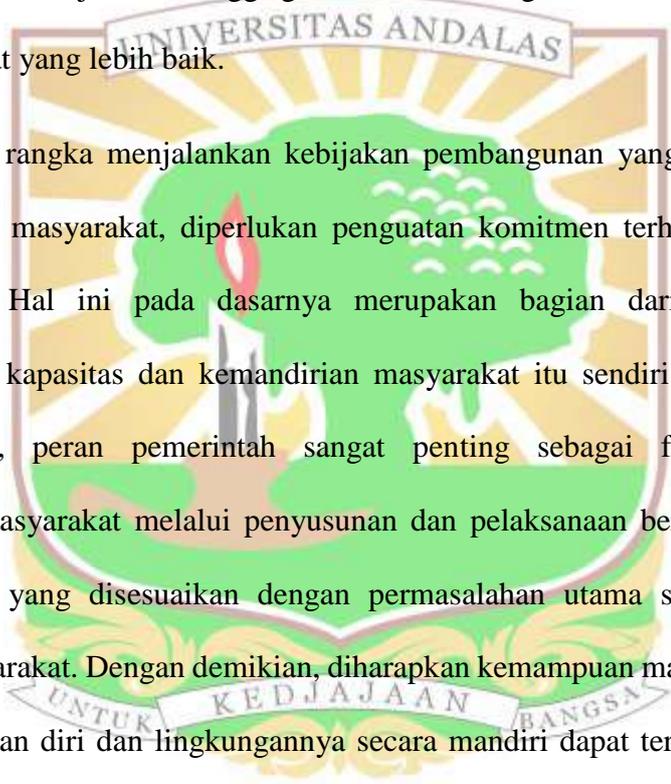


Sumber Dokumentasi Laporan BBGRM Kecamatan Padang Timur Tahun 2024

Pada Gambar 1.3 dapat dilihat bahwa proses pembangunan akan dilaksanakan setelah musyawarah untuk memilih daerah yang layak untuk dilaksanakan pembangunan diputuskan. Tahap selanjutnya adalah dengan melakukan survey lapangan yang menyertakan perwakilan dari kecamatan, perwakilan kelurahan, dan masyarakat. Ketika tahap survey sudah terlaksana maka tahapan selanjutnya adalah melaksanakan proses pembangunan dengan cara gotong royong yang menggabungkan kolaborasi antara instansi pemerintahan, aparat kepolisian dan militer, hingga masyarakat umum.

Kesadaran kolektif yang dibangun melalui BBGRM diharapkan dapat memupuk semangat kebersamaan dan gotong royong yang lebih kuat, sehingga masyarakat semakin peduli dan memiliki tanggung jawab atas kemajuan dan perkembangan lingkungan mereka sendiri. Selain itu, program BBGRM ini juga berperan penting pada usaha untuk memperkuat hubungan yang terjalin antar masyarakat dan pemerintah setempat, melalui dialog dan kerja sama yang lebih erat dalam merencanakan dan melaksanakan proyek pembangunan. Dengan adanya keterlibatan langsung dari masyarakat, hasil-hasil pembangunan diharapkan lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi lokal, sehingga masyarakat merasa memiliki

dan bertanggung jawab atas keberlanjutan pembangunan tersebut. BBGRM juga diharapkan menjadi ajang untuk menumbuhkan rasa bangga terhadap kemajuan yang dicapai secara bersama-sama, serta memelihara rasa memiliki yang mendalam terhadap lingkungan sekitar, baik dari segi fisik, sosial, maupun ekonomi. Semakin tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam BBGRM diharapkan tidak hanya berdampak pada pembangunan jangka pendek, tetapi juga memberikan dampak positif yang berkelanjutan, sehingga generasi mendatang bisa mewarisi lingkungan dan masyarakat yang lebih baik.



Dalam rangka menjalankan kebijakan pembangunan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat, diperlukan penguatan komitmen terhadap nilai-nilai kebersamaan. Hal ini pada dasarnya merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat itu sendiri. Dalam proses pemberdayaan, peran pemerintah sangat penting sebagai fasilitator yang mendukung masyarakat melalui penyusunan dan pelaksanaan berbagai program pembangunan yang disesuaikan dengan permasalahan utama serta kebutuhan prioritas masyarakat. Dengan demikian, diharapkan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan diri dan lingkungannya secara mandiri dapat terus berkembang dan berkelanjutan.

Pada dasarnya, pada pelaksanaan kebijakan merupakan proses di mana para pelaksana kebijakan akan berupaya merealisasikan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam perumusan kebijakan. Tanpa ditemukannya pelaksanaan, sasaran dari kebijakan tersebut tidak akan mampu dicapai. Meskipun sebuah kebijakan telah dirancang dengan sangat amat baik, tapi jika tidak dijalankan, maka nantinya

kebijakan itu hanya akan menjadi dokumen yang menumpuk didalam institusi pemerintahan. Oleh karna itu, tahap implementasi memegang peranan yang sangat penting dalam siklus kebijakan publik. Menurut Riant Nugroho, perencanaan hanya akan menyumbang 20% dari keberhasilan, sedangkan pelaksanaannya mencakup 60%, dan sisanya akan bergantung pada pengendalian pelaksanaan tersebut. Pelaksanaan kebijakan sering kali menjadi bagian yang paling menantang karena di sinilah berbagai persoalan yang tidak terlihat dalam tahap perencanaan mulai muncul di lapangan.⁹ Dalam pelaksanaan Program BBGRM, tentu saja tidak dapat diharapkan bahwa program ini akan berjalan lancar tanpa menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Proses pelaksanaan sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor pendukung yang memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan program.

Menurut Van Meter & Van Horn, salah satu faktor yang menentukan keberhasilan dalam implementasi suatu kebijakan atau program adalah sejauh mana standar dan tujuan dari kebijakan tersebut dirumuskan secara jelas dan terarah.¹⁰ Pelaksanaan program BBGRM didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005, yang kemudian diperkuat oleh Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 55 Tahun 2007 mengenai Pedoman Umum Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong. Dalam mengkaji implementasi kebijakan ini, digunakan model pendekatan top-down yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn, dikenal dengan sebutan A Model of the Policy Implementation. Model

⁹ Riant Nugroho (2011), *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*, Jakarta, Elex Media Komputindo hlm. 625-626.

¹⁰ Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & society*, 6(4), 445-488.

ini menyajikan suatu kerangka konseptual yang menggambarkan keterkaitan antara berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas dan kinerja suatu kebijakan.¹¹ Van Meter dan Van Horn memberi penjelasan bahwa ada 6 variabel pokok yang mempengaruhi efektivitas dalam proses pelaksanaan kebijakan publik. Variabel-variabel tersebut meliputi: kejelasan standar dan tujuan kebijakan; ketersediaan sumber daya; efektivitas komunikasi antarorganisasi serta kegiatan implementasi; karakteristik dari lembaga atau agen pelaksana; kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang melingkupi; serta sikap atau disposisi dari para pelaksana kebijakan.

Keberhasilan implementasi pada suatu kebijakan tentu tidak bisa lepas dari sasaran pada kebijakan tersebut. Dalam hal ini, program BBGRM mempunyai sasaran sebagai berikut¹²

1. Meningkatnya semangat jiwa gotong royong dalam pembangunan kelurahan berdasarkan azas kekeluargaan dan kebersamaan dalam rangka mempererat kesatuan dan persatuan masyarakat.
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
3. Meningkatnya kemitraan antara masyarakat dan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan.
4. Meningkatnya peran aktif lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pembangunan yang partisipasif.
5. Memanfaatkan seluruh potensi pembangunan di Kelurahan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna.

¹¹ Riant Nugroho (2011), *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*, Jakarta, Elex Media Komputindo, hlm. 627.

¹² Petunjuk Teknis Manunggal Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Kota Padang

6. Meningkatkan rasa kebersamaan dan kekeluargaan di dalam masyarakat.

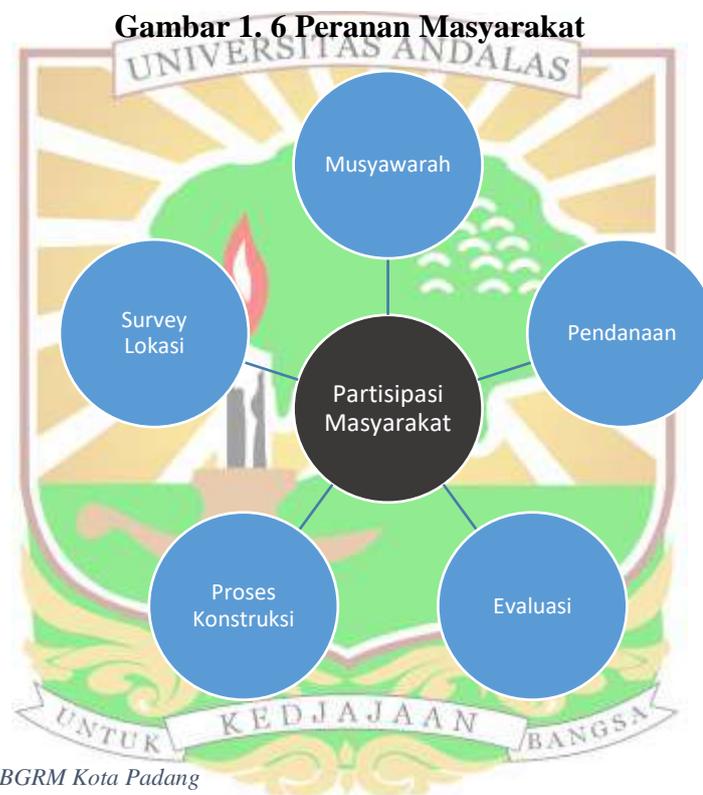
Keberhasilan dalam mengimplementasikan suatu program atau kebijakan sangat dipengaruhi oleh kualitas dan ketersediaan sumber daya manusia maupun non-manusia yang terlibat. Berdasarkan petunjuk teknis pelaksanaan BBGRM di Kota Padang, dijelaskan bahwa selain melibatkan partisipasi aktif masyarakat, pelaksanaan program pembangunan yang bersifat fisik seperti pembangunan jalan baru, jembatan, sistem irigasi, maupun gedung memerlukan keterlibatan tenaga teknis. Untuk itu, setiap rencana pembangunan fisik harus diajukan terlebih dahulu dalam bentuk proposal kepada Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kota Padang guna memperoleh rekomendasi dari Tim Teknis yang berwenang (Bappeda, Dinas Perkim, PUPR dan DLH)¹³.

Pada variable komunikasi antar organisasi dan aktivitas implementasi yang dilakukan pada program ini adalah penyampaian informasi pelaksanaan Manunggal Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dilakukan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Padang kepada masyarakat mulai dari Tingkat Kota, Dinas Instansi, Kecamatan dan Kelurahan serta penyampaian informasi melalui himbuan, media masa, surat resmi, RRI Regional Kota Padang, maupun TV Padang.

Van Meter dan Van Horn juga menekankan pentingnya faktor disposisi atau sikap dari para pelaksana (implementor) dalam memengaruhi keberhasilan suatu kebijakan atau program. Dalam konteks pelaksanaan di lapangan, pejabat pemerintah seperti pihak Kesejahteraan Rakyat yang bertindak sebagai representasi

¹³ Petunjuk Teknis Manunggal Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Kota Padang

langsung dari Walikota, serta aparat di tingkat kecamatan dan kelurahan, umumnya memberikan disposisi atau arahan kepada para pelaksana teknis. Implementor inilah yang bertanggung jawab untuk menjalankan program secara langsung sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, seperti Dinas terkait (Bappeda, Dinas Perkim, PUPR dan DLH), Lembaga Masyarakat (LPM,LKK,KARANG TARUNA), hingga masyarakat.



Salah satu faktor pokok yang sangat memberi pengaruh kepada efektivitas dalam proses pengimplementasian suatu kebijakan adalah kondisi sosial, ekonomi, dan politik di lingkungan masyarakat. Dalam hal ini, peneliti menemukan berbagai persoalan yang kerap muncul dalam pelaksanaan program berbasis gotong royong, khususnya terkait dengan kesulitan dalam membangun komitmen, memotivasi masyarakat, serta mengarahkan pola pikir mereka agar sejalan dengan tujuan

program. Hambatan ini umumnya disebabkan oleh latar belakang sosial dan ekonomi masyarakat yang beragam, yang kemudian menciptakan perbedaan dalam cara pandang dan respons terhadap kebijakan yang diterapkan. Terlebih di era modern seperti sekarang, masyarakat perkotaan cenderung memiliki karakter yang lebih individualistis, yang secara langsung berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi dalam program BBGRM.

Di Kota Padang, pelaksanaan BBGRM diharapkan dapat menjadi motor penggerak dalam meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan lokal yang berkelanjutan. Melalui program ini, warga diharapkan tidak hanya terlibat dalam kegiatan fisik seperti pembangunan infrastruktur, tetapi juga berperan aktif dalam berbagai inisiatif sosial, ekonomi, dan budaya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup bersama.

Implementasi pada suatu kebijakan juga erat kaitannya dengan peranan dari masyarakat. Peranan masyarakat pada pembangunan dalam program BBGRM di Kota Padang cukup banyak, mulai dari tahap perencanaan seperti musyawarah, survey lokasi, pendanaan seperti pemberian bahan material hingga penghibahan tanah, proses pembangunan konstruksi, hingga sampai kepada tahap evaluasi. Pada tahapan pembangunan masyarakat bersama TNI, Polri hingga pejabat Kecamatan dan Kelurahan turut berpartisipasi langsung dalam proses pengerjaan proyek.

Berdasarkan berbagai fenomena yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti merasa terdorong untuk menelusuri lebih dalam bagaimana implementasi program BBGRM di Kota Padang dapat memberikan kontribusi nyata terhadap kemajuan daerah tersebut, serta mengidentifikasi berbagai hambatan yang muncul selama

proses pelaksanaannya. Dalam menganalisis hal tersebut, peneliti memilih untuk menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn. Pemilihan teori ini didasarkan pada kesesuaian pendekatan yang ditawarkan, yaitu pendekatan top-down, di mana implementasi kebijakan dilakukan dari tingkat pengambil kebijakan ke tingkat pelaksana. Pendekatan ini dianggap relevan karena program BBGRM sendiri merupakan kebijakan pemerintah pusat yang diterapkan ke seluruh daerah. Selain itu, teori ini juga selaras dengan permasalahan yang menjadi fokus penelitian, mengingat adanya berbagai faktor teknis dan sosial yang memengaruhi keberhasilan implementasi di tingkat lokal. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti menetapkan judul penelitian ini sebagai "Implementasi Program Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Di Kota Padang" untuk menyelidiki situasi tersebut secara menyeluruh.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang didapatkan bahwa bagaimana Implementasi Program BBGRM Di Kota Padang?.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai untuk mengetahui bagaimana Implementasi BBGRM Di Kota Padang

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan tujuan penelitian tersebut, maka diharapkan penelitian ini akan dapat bermanfaat:

1. Manfaat secara teoritis

Berguna sebagai sarana penulis untuk memperluas wawasan mengenai Implementasi Program BBGRM Di Kota Padang.

2. Manfaat secara praktis

Dengan adanya penelitian ini nantinya akan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi Pemerintah Kota Padang, dinas terkait ,maupun masyarakat luas mengenai pentingnya memperhatikan Implementasi Program BBGRM di Kota Padang, selain itu hasil dari penelitian ini nantinya juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian di bidang yang sama di masa yang akan datang.

